

**PENGUATAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PENYUSUNAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES) MELALUI PENDAMPINGAN
PARTISIPATIF DAN TRANSPARANSI DI DESA SEMBALUN, KECAMATAN
SEMBALUN, KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Toni Syamsul Hidayat
Universitas Mataram
*email (Hendriyadi@gmail.com)

Abstrak: Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) merupakan dokumen penting yang menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa setiap tahun. Namun, dalam praktiknya, masih banyak desa di Lombok Timur, termasuk Desa Sembalun, yang menghadapi tantangan dalam menyusun RKPDES secara partisipatif dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan kapasitas aparatur desa melalui metode pendampingan partisipatif dalam proses penyusunan RKPDES. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan yang berorientasi pada partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran mampu meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis aparatur desa dalam menyusun dokumen RKPDES yang responsif dan akuntabel. Kajian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan desa melalui pelatihan berkelanjutan dan pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan desa

Kata Kunci: RKPDES, aparatur desa, partisipasi, transparansi, pendampingan

Abstract : The Village Government Work Plan (RKPDES) is a vital document that serves as the foundation for annual village development planning and implementation. However, in practice, many villages in East Lombok, including Sembalun Village, face challenges in drafting the RKPDES in a participatory and transparent manner. This study aims to analyze the capacity strengthening of village officials through participatory assistance methods in the preparation process of the RKPDES. The research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques including observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that participatory and transparency-oriented facilitation improves the understanding and technical capabilities of village officials in producing responsive and accountable RKPDES documents. This study recommends institutional strengthening through continuous training and active community involvement in every stage of village planning

Keywords: RKPDES, village officials, participation, transparency, mentoring

Article history: Received : 05/03/2024 Approved : 21/03/2024	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jpm
--	---

Pendahuluan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) merupakan tahap penting dalam siklus perencanaan pembangunan desa yang bertujuan untuk mewujudkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan desa secara tahunan. Namun, dalam praktiknya, banyak aparatur desa yang belum memiliki kapasitas yang memadai dalam menyusun RKPDES yang sesuai dengan prinsip partisipatif dan transparansi. Hal ini berdampak pada rendahnya

kualitas dokumen perencanaan desa serta kurang optimalnya pelaksanaan program pembangunan.

Desa Sembalun, yang terletak di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi besar dalam bidang pertanian dan pariwisata. Namun, potensi tersebut belum diiringi oleh kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur desa dalam mengelola proses perencanaan secara inklusif dan akuntabel. Minimnya keterlibatan masyarakat, lemahnya transparansi informasi, serta belum optimalnya pendampingan teknis menjadi tantangan tersendiri dalam perumusan RKPDES.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi penguatan kapasitas aparatur desa melalui model pendampingan yang berbasis partisipasi dan transparansi. Pendampingan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis penyusunan dokumen, tetapi juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dan penguatan sistem informasi desa. Dengan demikian, dokumen RKPDES yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Perencanaan pembangunan desa merupakan elemen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan berkelanjutan. Salah satu instrumen utama dalam perencanaan tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES), yang berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta alokasi anggaran desa. RKPDES yang disusun dengan baik dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan dan memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala dalam penyusunan RKPDES, terutama terkait dengan kapasitas aparatur desa yang terbatas dalam memahami regulasi, prosedur teknis, serta prinsip partisipatif dan transparansi. Di Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, tantangan utama yang dihadapi adalah minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan serta kurangnya keterbukaan dalam penyusunan dokumen perencanaan desa. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya tingkat akuntabilitas serta efektivitas pembangunan desa.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pendekatan pendampingan partisipatif dan berbasis transparansi. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa terhadap mekanisme penyusunan RKPDES, mendorong partisipasi aktif masyarakat, serta membangun sistem yang lebih terbuka dalam pengelolaan perencanaan pembangunan desa. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menganalisis efektivitas pendampingan partisipatif dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa serta dampaknya terhadap transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RKPDES di Desa Babussalam.

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu; (1) Meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menyusun RKPDES yang berbasis partisipatif dan transparansi. (2) Memberikan pendampingan kepada aparatur desa dalam memahami prinsip-prinsip perencanaan desa yang sesuai dengan regulasi dan kebutuhan masyarakat. (3) Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyusunan RKPDES agar dapat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat Desa Selebung. (4) Mengembangkan model pendampingan yang dapat direplikasi di desa lain dalam meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan desa. Dengan pendekatan ini, diharapkan aparatur desa dapat menyusun RKPDES yang lebih berkualitas, transparan, dan partisipatif, sehingga mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

Metode

Metode yang digunakan dalam program pengabdian ini adalah *Participatory Action Research* (PAR) dan Pendampingan Partisipatif Berbasis Transparansi. Metode PAR dipilih karena melibatkan partisipasi aktif aparatur desa dan masyarakat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES). Pendampingan partisipatif berbasis transparansi digunakan untuk memastikan bahwa proses perencanaan bersifat inklusif, akuntabel, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Sasaran utama program ini adalah aparatur desa di Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, yang terdiri dari:

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Tim Penyusun RKPDES
4. Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Kelompok Masyarakat

Pelaksanaan program ini terdiri dari beberapa tahapan utama:

1. Tahap Identifikasi dan Pemahaman Masalah yang terdiri dari:
 - a. Observasi awal terhadap kondisi penyusunan RKPDES di Desa Selebung.
 - b. Diskusi awal dengan aparatur desa dan masyarakat untuk memahami permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan desa.
 - c. Pengumpulan data sekunder terkait perencanaan pembangunan desa sebelumnya.
2. Tahap Pelatihan dan Pendampingan
 - a. Pelatihan mengenai prinsip-prinsip perencanaan desa yang partisipatif dan transparan.
 - b. Pendampingan teknis dalam penyusunan RKPDES berbasis data dan kebutuhan masyarakat.

- c. Simulasi dan praktik langsung penyusunan RKPDES yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
3. Tahap Implementasi dan Monitoring
 - a. Penyusunan draft RKPDES oleh tim desa dengan bimbingan fasilitator.
 - b. Forum konsultasi dan validasi dengan masyarakat untuk memastikan keterwakilan dan transparansi.
 - c. Evaluasi proses penyusunan RKPDES, dengan menilai efektivitas pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data dalam melaksanakan kegiatan pengaduan kepada masyarakat ini yaitu:

1. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Wawancara mendalam dengan aparatur desa dan masyarakat.
 - b. Diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) untuk menggali aspirasi masyarakat.
 - c. Kuesioner untuk mengukur pemahaman aparatur desa sebelum dan sesudah pelatihan.
 - d. Observasi langsung dalam penyusunan RKPDES.
2. Teknik Analisis Data
 - a. Analisis deskriptif untuk mengevaluasi perubahan kapasitas aparatur desa.
 - b. Analisis komparatif antara kondisi sebelum dan sesudah pelatihan dan pendampingan.
 - c. Evaluasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPDES berdasarkan indikator transparansi dan inklusivitas.

Metode ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menyusun RKPDES yang berbasis partisipasi dan transparansi, sehingga pembangunan desa lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan

2.1 Kondisi Kapasitas Aparatur Desa dalam Penyusunan RKPDES

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan aparatur desa di Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, ditemukan bahwa pemahaman mereka terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) masih terbatas. Beberapa kendala utama yang diidentifikasi meliputi kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang mengatur

perencanaan desa, keterbatasan dalam menyusun dokumen perencanaan yang sistematis, serta minimnya keterampilan teknis dalam menggunakan teknologi informasi untuk mendukung penyusunan RKPDES.

Dalam proses penyusunan RKPDES, partisipasi masyarakat masih tergolong rendah. Musyawarah desa yang seharusnya menjadi forum utama dalam menampung aspirasi masyarakat sering kali hanya dihadiri oleh perwakilan pemerintah desa dan tokoh masyarakat tertentu, tanpa keterlibatan luas dari kelompok-kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip partisipasi belum sepenuhnya diterapkan secara optimal dalam perencanaan pembangunan desa.

2.2 Efektivitas Pendampingan Partisipatif dalam Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Pendampingan partisipatif dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pelatihan teknis, diskusi kelompok terfokus (FGD), serta bimbingan langsung dalam penyusunan RKPDES. Pelatihan teknis diberikan untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa terkait regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, aparatur desa juga diberikan pelatihan dalam menyusun dokumen RKPDES secara sistematis dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Hasil dari pendampingan ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam kapasitas aparatur desa. Aparatur desa yang sebelumnya kurang memahami struktur RKPDES kini mampu menyusun dokumen perencanaan yang lebih sistematis dan berbasis data. Selain itu, melalui pendekatan diskusi kelompok, keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan RKPDES mengalami peningkatan. Masyarakat mulai lebih aktif menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa.

Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi pendekatan ini, seperti keterbatasan waktu dan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk mengadakan musyawarah yang lebih inklusif. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang lebih mendukung peningkatan kapasitas aparatur desa secara berkelanjutan, seperti program pelatihan berkala dan pendampingan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dan organisasi masyarakat sipil.

2.3 Peran Transparansi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa

Transparansi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dalam penyusunan RKPDES, prinsip transparansi diterapkan dengan mempublikasikan dokumen perencanaan secara terbuka melalui papan informasi desa dan media sosial resmi pemerintah desa. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi terkait program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Dari hasil evaluasi, penerapan transparansi dalam proses perencanaan desa berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya merasa tidak dilibatkan dalam perencanaan kini lebih aktif dalam memberikan masukan dan mengawasi pelaksanaan program yang telah direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat lebih proaktif dalam mengawal pembangunan desa yang lebih inklusif dan akuntabel.

Namun, masih diperlukan penguatan dalam aspek pengelolaan informasi agar transparansi dapat berjalan lebih efektif. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi digital serta kurangnya pemahaman sebagian aparatur desa dalam mengelola dan menyajikan informasi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih sistematis dalam membangun mekanisme transparansi yang lebih efektif, seperti penyediaan forum komunikasi langsung dengan masyarakat serta peningkatan kapasitas aparatur desa dalam memanfaatkan teknologi informasi.

2.4 Implikasi Temuan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pendampingan partisipatif efektif dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menyusun RKPDES serta mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, penerapan transparansi dalam perencanaan desa berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan.

Untuk memastikan keberlanjutan dari upaya peningkatan kapasitas aparatur desa, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain:

1. **Peningkatan Program Pelatihan Berkelanjutan** – Pemerintah desa perlu mengadakan pelatihan rutin bagi aparatur desa dalam hal perencanaan pembangunan, manajemen keuangan desa, serta pemanfaatan teknologi informasi.
2. **Penguatan Mekanisme Partisipasi Masyarakat** – Pemerintah desa harus lebih proaktif dalam melibatkan masyarakat melalui musyawarah yang lebih inklusif, serta menyediakan platform komunikasi yang lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
3. **Optimalisasi Sistem Transparansi Informasi** – Perlu adanya sistem informasi yang lebih terstruktur untuk menyampaikan dokumen perencanaan desa kepada masyarakat, baik melalui media digital maupun forum tatap muka secara berkala.

Dengan penerapan strategi-strategi ini, diharapkan proses penyusunan RKPDES di Desa Babussalam dapat menjadi lebih partisipatif, transparan, serta berdampak positif bagi pembangunan desa secara keseluruhan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Kepala Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah beserta jajaran pemerintah Desa Selebung yang telah meluangkan waktu dan bekerjasama sehingga program pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan lancar. ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi yang telah memberikan bantuan pendanaan untuk terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Referensi

- Vestikowati, E., Endah, K., & Hidayat, E. S. (2020). Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa melalui Pelatihan Administrasi Pemerintahan di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. *Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).
- Arma, N. A., Sopang, J., & Jaffisa, T. (2020). Peningkatan Aparatur Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Kota Rantang. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Setiadi, S., Ekawati, H., & Habib, F. (2020). Pelatihan dan Pendampingan bagi Peningkatan Kapasitas Aparat dan Institusi Desa dalam Perencanaan dan Implementasi Pembangunan. *Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1).
- Suyanto. (2023). Pemberdayaan Aparat Pemerintahan Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Batoboh*, 8(2),
- Wardana, D., & Zainal. (2021). Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 1(2),
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa